

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

- 1) Berdasarkan banyaknya kasus korupsi menjelang Pemilukada yang menyeret Kepala Daerah dan pejabat Pemerintahan Daerah dan telah diputus bersalah di Pengadilan dalam pengelolaan dana Hibah dan Bantuan Sosial, Penulis berpendapat ditemukan adanya relasi belanja Hibah dan Bantuan Sosial APBD terkait pelaksanaan Pemilukada. Penulis menemukan kecenderungan belanja Hibah dan Bantuan Sosial mengalami kenaikan yang signifikan menjelang pelaksanaan pemilukada dan mendapati fakta banyaknya tindak pidana korupsi yang diakibatkan penyalahgunaan kedua anggaran belanja tersebut. Hal ini menyebabkan belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang seharusnya ditujukan untuk menunjang penyelenggaraan pembangunan daerah banyak digunakan untuk kepentingan politis penguasa.
- 2) Kebijakan penganggaran belanja Hibah dan Bantuan Sosial dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD tidak mengatur mengenai manajemen pagu anggaran, serta pengertian yang jelas mengenai kemampuan keuangan daerah dan klasifikasi alokasi anggaran dalam memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang seharusnya tidak bersifat wajib malah menjadi

prioritas, sehingga banyak pemerintah daerah di Indonesia menganggarkan jumlah alokasi yang besar yang dipandang peruntukannya tidak efisien dan efektif dan tidak didasarkan pada analisis kebutuhan prioritas daerah.

- 3) Prinsip pertanggungjawaban belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD oleh pemerintah daerah dan penerima bantuan lebih bersifat laporan dokumen administrasi saja tanpa adanya prinsip akuntabilitas dalam kinerja, hasil serta manfaat yang diterima sebagai tujuan program Hibah yaitu bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah serta Bantuan Sosial yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

5.2 Saran

- 1) Hendaknya diatur sistem transparansi dan akuntabilitas bagi Pemerintah Daerah dan penerima bantuan dengan rincian jelas dan bersifat wajib tentang penggunaan dan pertanggungjawabannya, sehingga dana Hibah dan Bantuan Sosial tidak selalu menggelembung setiap Pemilikada dan benar-benar memiliki manfaat bagi pengembangan kapasitas masyarakat, meningkatkan partisipasi dalam pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya aturan bersifat wajib tentang publikasi laporan perencanaan, penganggaran dan penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial agar lembaga pengawasan, masyarakat dan pihak terkait dengan

- 2) mudah mendapatkan informasi sebagai bentuk pengawasan. Sehingga pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek laporan administrasi saja, tetapi menyangkut proses, keluaran serta manfaatnya dapat dinilai oleh masyarakat.
- 3) Pentingnya diatur jelas rumusan mengenai pagu anggaran Hibah dan Bantuan Sosial terhadap kemampuan keuangan daerah dan klasifikasi pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan sebagai prioritas pembangunan daerah. Sehingga Hibah dan Bantuan sosial yang sejatinya bertujuan untuk menunjang pembangunan daerah dan kesejahteraan menjadi efektif dan efisien yakni berdaya guna dan berhasil-guna. Kriteria efektif diukur dengan parameter bantuan yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial.
- 4) Sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabel, dan partisipatif yang merupakan ciri dasar tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), maka perlu diatur mengenai pertanggungjawaban baik oleh Pemerintah Daerah maupun penerima bantuan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan termasuk keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai laporan penggunaan Hibah dan Bantuan Sosial serta jenis belanja barang dan jasa dalam program melalui media pertanggungjawaban berupa laporan pelaksanaan (akuntabilitas kinerja) secara periodik.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agus Dwiyanto, 2008. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Budi Winarno, 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Media Presindo, Yogyakarta.
- Deddi dkk, 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. Salemba Empat, Jakarta.
- Didjaja Mustopa, 2003. *Transparansi Pemerintah*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Djalil Rizal, 2014. *Akuntabilitas Keuangan Daerah Implementasi Pasca Reformasi*. Semesta Rakyat Merdeka, Jakarta.
- Halim Abdul, 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat, Jakarta.
- Haris Syamsuddin, 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah)*. LIPI Press, Jakarta.
- Indra Bastian, 2007. *Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik*. Erlangga, Jakarta.
- Jones Charles O, 1996. *Pengantar Kebijakan Publik*. Editor Nashir Budiman. Grafindo Persada, Jakarta.
- Koirudin, 2005. *Sketsa Kebijakan Desentralisasi Di Indonesia Format Masa Depan Otonomi Menuju Kemandirian Daerah*. Averroes Press, Malang.
- Kristianten, 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Mahmudi, 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Mardiasmo, 2000. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2002. *Tentang Akuntansi Sektor Publik Dalam Mewujudkan Good Governance Dalam Perspektif Otonomi Daerah Dalam Desentralisasi Fiskal Menuju Indonesia Baru*. ANDI, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. ANDI, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI, Yogyakarta.

- Mardiasmo, 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. ANDI, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2006. *Perpajakan*. ANDI, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. ANDI, Yogyakarta.
- Mursyidi, 2013. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.
- Pasolong Harbani, 2010. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta, Bandung.
- Sedarmayanti, 2012. *Good Governance öKepemerintahan Yang Baikö*. Mandar Maju, Bandung.
- Sinambela Lijan Poltak, 2006. *Reformasi Pelayanan Publik*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Thoha, 2000. *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Raja Grafindo, Jakarta.
- W Riawan Tjandra, 2014. *Hukum Keuangan Negara*. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

JURNAL DAN MAKALAH

- Eathewin, 2011. *Transparansi Dalam Prinsip-Prinsip Tata Kelola Yang Baik Pada Pelaksanaan MBS*.
- Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional, 2007. *Tata Kepemerintahan yang Baik, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Per encanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)*. Jakarta.
- Mardiasmo, 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* Vol 2. Hlm 3

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN.

UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.

UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

UU No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.

UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.

PP No. 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah.

PP No. 21 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL).

PP No. 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

PP No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

PP No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

PP No. 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga.

Inpres No. 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

ONLINE:

BPK RI, 2013. *Awasi Bantuan Sosial*. (Online) <http://www.bpk.go.id/news/awasi-bantuan-sosial>, Diakses 27 Oktober 2017

KPK Pers, 2014. *Cegah Dana Bansos dan Hibah dari Penyalahgunaan*. (Online) <http://kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1657-cegah-dana-bansos-dan-Hibah-dari-penyalahgunaan>

Hukum Online, 2014. *KPK Imbau Kepala Daerah Hindari Penyalahgunaan Dana Bansos*. (Online) <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52e53c40c429f/kpk-imbau-kepala-daerah-hindari-penyalahgunaan-dana-bansos>

Detik News, 2014. *Mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada Divonis 10 Tahun Penjara*. (Online) <https://news.detik.com/jawabarat/2567315/mantan-wali-kota-bandung-dada-rosada-divonis-10-tahun-penjara>

SumutPos.co, 2015. *Ada 4 Modus Korupsi Bansos Sumut, Apa Saja?*. (Online) <http://sumutpos.co/2015/08/08/ada-4-modus-korupsi-bansos-sumut-apa-saja/>

Liputan6 News, 2016. *Gatot Pujo Dituntut 8 Tahun Penjara dalam Kasus Dana Hibah Bansos*. (Online) <http://news.liputan6.com/read/2649095/gatot-pujo-dituntut-8-tahun-penjara-dalam-kasus-dana-Hibah-bansos>

Media Indonesia, 2016. *Fitra Temukan Korupsi Bansos Banten 114,2 Miliar*. (Online) <http://mediaindonesia.com/index.php/news/read/43903/fitra-temukan-korupsi-bansos-banten-114-2-miliar/2016-05-05>

MetroTV News, 2017. *Celah Korupsi Dana Hibah*. (Online) <http://news.metrotvnews.com/read/2017/01/31/650682/celah-korupsi-dana-Hibah>